

**PENGARUH KESEHATAN, PENDIDIKAN, DAN INFLASI TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi di
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



OLEH:

ROLLAND

98732/2009

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2014

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

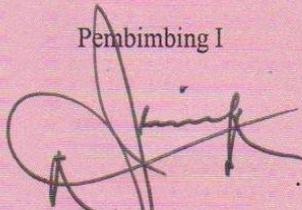
**PENGARUH KESEHATAN, PENDIDIKAN, DAN INFLASI TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA**

Nama : **Rolland**
TM/NIM : **2009/98732**
Keahlian : **Perencanaan Pembangunan**
Program Studi: **Ekonomi Pembangunan**
Fakultas : **Ekonomi**

Padang, Juli 2014

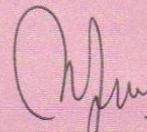
Disetujui Oleh

Pembimbing I



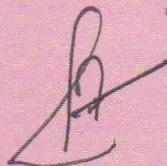
Dr. Idhis, M.Si
NIP.19610703 198503 1 005

Pembimbing II



Mike Triani, SE, MM
NIP.19840129 200912 2 002

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan



Drs. H. Ali Anis, MS
NIP.19591129 198602 1 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

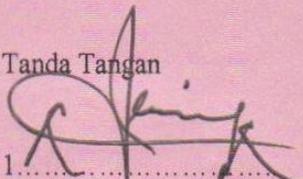
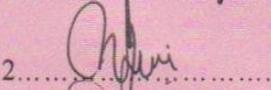
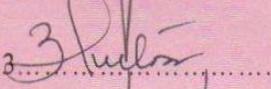
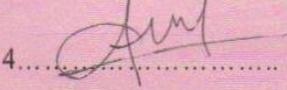
**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Universitas Negeri Padang**

**PENGARUH KESEHATAN, PENDIDIKAN, DAN INFLASI TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA**

Nama : Rolland
TM/NIM : 2009/98732
Tempat/Tgl Lahir : Solok / 14 Januari 1991
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juli 2014

Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Idris. M.Si	1. 
2. Sekretaris	: Mike Triani, SE.MM	2. 
3. Anggota	: Dr. Sri Ulfa Sentosa, MS	3. 
4. Anggota	: Ariusni, SE, M.Si	4. 

SURAT PERNYATAAN

Sayayang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rolland
Nim/ Tahun Masuk : 98732/2009
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang/ 14 Januari 1991
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Komplek Polda Blok E1 no 14 Balai Baru Padang
No. HP/telp. : 081277874120
Judul Skripsi : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar yang diperoleh karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, 24 April 2014
Yang Menyatakan



ABSTRAK

Rolland, 2009/98732: Pengaruh Kesehatan, Pendidikan, dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di bawah Bimbingan Bapak Dr.Idris, M.Si dan Mike Triani SE, MM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) pengaruh kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, 2) pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, 3) pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, 4) pengaruh kesehatan, pendidikan, dan inflasi secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif. Jenis data adalah data sekunder dan poling yaitu gabungan data *time series* dan *cross section* dengan periode waktu 2008-2012. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan studi pustaka. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif dan Analisis Induktif yang terdiri atas: Analisis data panel, Uji Autokorelasi, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas, Koefisien Determinasi (R^2), Uji t dan Uji F.

Hasil penelitian adalah 1) kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. 2) pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. 3) inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. 4) kesehatan, pendidikan, dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia

Saran yang direkomendasikan dalam penelitian ini yaitu 1) diharapkan mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dimasing-masing daerah seperti pendidikan dan keterampilan. Pendidikan dan keterampilan memiliki besaran pengaruh yang relatif besar dalam mengurangi tingkat kemiskinan, untuk itu kebijakan pemerintah yang menetapkan wajib belajar 9 tahun agar ditingkatkan menjadi 12 tahun hingga perguruan tinggi. hal ini mencerminkan bahwa modal manusia merupakan determinan penting dalam mengentaskan tingkat kemiskinan. 2) inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Karena inflasi berpengaruh terhadap harga-harga secara umum. Kenaikan harga yang tinggi dan secara terus-menerus bukan saja menimbulkan efek buruk terhadap kegiatan perekonomian negara, tetapi juga berdampak terhadap kemakmuran masyarakat yang bisa menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah untuk bisa menekan laju inflasi hingga tingkat terendah agar kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Seiring shalawat dan salam kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa perubahan besar di atas permukaan bumi, sehingga kita dapat merasakan kehidupan seperti pada saat sekarang ini.

Selanjutnya penulis mengatur rasa terimakasih yang sangat mendalam kepada Papa dan Mama yang telah memberikan dukungan kepada penulis yang tak pernah bosan dan lelah mengiringi langkah penulis dalam mencapai cita-cita dunia dan akhirat. Dukungan moril dan materil yang tidak akan terbalaskan oleh penulis kepada Papa dan Mama tersayang. Jika di tulis tidak akan tertulis, bila di balas tidak akan terbalas itulah ungkapan yang dapat penulis ucapkan kepada Papa dan Mama yang tidak kenal lelah dalam mendukung dan mendidik penulis selama ini. Hanya doa yang bisa penulis berikan, semoga Allah SWT meridhoi hidup dan kehidupan Papa dan Mama serta semua orang tua yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik anak-anaknya kearah yang baik. Semoga kelak diakhirat dimasukan kedalam jannahNya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menemui kesulitan-kesulitan yang tidak dapat diselesaikan sendiri, namun melalui pembimbing dan staf

pengajar di Fakultas ekonomi penulis dapat mencari solusi dari permasalahan yang di hadapi, sehingga pada akhirnya penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Idris, M.Si dan Ibuk Mike Triani SE. MM selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, saran, dan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibuk Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S dan Ibuk Ariusni, SE. M.Si selaku Tim Penguji Skripsi dan yang telah memberikan saran-saran beserta masukan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Drs. H. Ali Anis, M.S selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan, dan Ibuk Novya Zulfa Riani, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
5. Staf administrasi program studi Ekonomi Pembangunan, Staf Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan pegawai pustaka yang telah membantu penulis dalam pengurusan penulisan skripsi.
6. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat beserta Staf yang telah membantu kelancaran bagi penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam skripsi ini.

7. Teristimewa penulis persembahkan buat Papa dan Mama yang penulis cintai dan hormati serta kakak dan adik-adik penulis yang telah memberikan kesungguhan doa, bantuan moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan Ekonomi Pembangunan angkatan 2009, rekan-rekan seperjuangan pada Fakultas Ekonomi khususnya, dan Universitas Negeri Padang pada umumnya.

Semoga semua yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi. Untuk itu penulis mohon maaf dan selalu mengharapkan informasi baik saran maupun kritik dari pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata dengan kerendahan hati dan kekurangan yang ada, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan memberikan manfaat bagi pembaca.

Padang, April 2014

Penulis

Rolland
NIM.98732

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	
A. Kajian teori	16
1. Kemiskinan	16
2. Kesehatan	21
3. Pendidikan	23
4. Inflasi	26
B. Temuan penelitian sejenis	31
C. Kerangka konseptual	32
D. Hipotesis	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis penelitian	35

B. Tempat dan waktu penelitian	35
C. Jenis dan sumber data	35
D. Variabel penelitian	36
E. Teknik pengumpulan data	37
F. Definisi operasional	37
G. Teknik analisis data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitan	48
1. Gambaran umum wilayah penelitian	48
2. Deskripsi variabel penelitian.....	49
3. Analisis Induktif.....	62
B. Pembahasan.....	68
1. Pengaruh kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di indonesia.....	68
2. Pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia....	69
3. Pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan di indonesia.....	71
KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

1. Persentase tingkat kemiskinan Provinsi di Indonesia tahun 2010-2012	3
2. Persentase Angka Harapan Hidup di 33 Provinsi Indonesia tahun 2010-2012	6
3. Persentase Angka Melek Huruf di 33 Provinsi Indonesia tahun 2010-2012	9
4. Persentase laju Inflasi di 33 Provinsi Indonesia tahun 2010-2012	12
5. Klasifikasi nilai (D-W)	44
6. Perkembangan tingkat kemiskinan di 33 Provinsi Indonesia 2010-2012	51
7. Perkembangan Angka Harapan Hidup di 33 Provinsi Indonesia tahun 2010-2012	54
8. Perkembangan Pendidikan di 33 Provinsi Indonesia tahun 2010-2012	57
9. Perkembangan laju Inflasi di 33 Provinsi Indonesia 2010-2012	60
10. Hasil Uji Chow-test	62
11. Hasil Uji Hausman	63
12. Hasil Estimasi Regresi Panel	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

1. Data mentah	79
2. Hasil pengolahan data regresi panel	
3. PLS (common effect)	82
4. Uji Chow-test	83
5. Uji Hausman	84
6. Hasil uji regresi panel.....	85
7. Tabel t (1-140).....	87
8. Tabel F (1-137)	90

^BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh sebagian besar negara di Dunia, terutama di negara sedang berkembang khususnya di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Asia. Sehingga kemiskinan menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah di Indonesia.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena pada saat ini kemiskinan membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu.

Kemiskinan yang terjadi disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti pertumbuhan ekonomi yang melambat dan berfluktuasi, tingkat inflasi yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, kesehatan yang rendah, dan tingkat upah yang diterima masih dibawah standar serta sebab-sebab sosial lainnya.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan pun telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tergolong masih tinggi. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan, sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek.

Di Indonesia, jumlah orang miskin tidak banyak berkurang dalam tiga puluh tahun terakhir. Dalam kurun waktu yang panjang tersebut, jelas sekali bahwa pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil yang diharapkan. Tabel 1.1 secara umum menunjukkan kecendrungan penurunan tingkat kemiskinan di 33 Provinsi Indonesia pada periode tahun 2008-2012.

Tabel 1.1
Tingkat Kemiskinan di 33 Provinsi Indonesia
Tahun 2008-2012

No	Provinsi	Tingkat Kemiskinan di Indonesia %				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Aceh	23,53	21,8	21	19,48	18,58
2	Sumatera Utara	12,55	11,51	11,3	10,83	10,41
3	Sumatera Barat	10,67	9,54	9,5	8,99	8
4	Riau	10,63	9,48	8,7	8,17	8,05
5	Kepulauan Riau	9,18	8,27	8,1	6,79	6,83
6	Jambi	9,32	8,77	8,3	7,9	8,28
7	Sumatera Selatan	17,73	16,28	15,5	13,95	13,48
8	Kep. Bangka Belitung	8,58	7,46	6,5	5,16	5,37
9	Bengkulu	20,64	18,59	18,3	17,36	17,51
10	Lampung	20,98	20,22	18,9	16,58	15,65
11	DKI Jakarta	4,29	3,62	3,5	3,64	3,7
12	Jawa barat	13,01	11,96	11,3	10,57	9,89
13	Banten	8,15	7,64	7,2	6,26	5,71
14	Jawa Tengah	19,23	17,72	16,6	16,21	14,98
15	DI Yogyakarta	18,32	17,23	16,8	16,14	15,88
16	Jawa Timur	18,51	16,68	15,3	13,85	13,08
17	Bali	6,17	5,13	4,9	4,59	3,95
18	Nusa Tenggara Barat	23,81	22,78	21,6	19,67	18,02
19	Nusa Tenggara Timur	25,65	23,31	23	20,48	20,41
20	Kalimantan Barat	11,07	9,3	9	8,48	7,96
21	Kalimantan Tengah	8,71	7,02	6,8	6,64	6,19
22	Kalimantan Selatan	6,48	5,12	5,2	5,35	5,01
23	Kalimantan Timur	9,51	7,73	7,7	6,63	6,38
24	Sulawesi Utara	10,1	9,79	9,1	8,46	7,64
25	Gorontalo	24,88	25,01	23,2	18,02	17,22
26	Sulawesi Tengah	20,75	18,98	18,1	16,04	14,94
27	Sulawesi Selatan	13,34	12,31	11,6	10,27	9,82
28	Sulawesi Barat	16,73	15,29	13,6	13,64	13,01
29	Sulawesi Tenggara	19,53	18,93	17,1	14,61	13,06
30	Maluku	29,66	28,23	27,7	22,45	20,76
31	Maluku Utara	11,28	10,36	9,4	10	8,06
32	Papua	37,08	37,53	36,8	31,24	30,66
33	Papua Barat	35,12	35,71	34,9	28,53	27,04
	Indonesia	15,42	14,15	13,3	12,3	11,46

Sumber : Badan pusat statistik indonesia

Tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode tahun 2008 hingga 2012 secara keseluruhan mengalami penurunan, seperti yang terlihat pada tabel 1.1 diatas, Dimana pada tahun 2008 tingkat kemiskinan di Indonesia yaitu sebesar 15,42 %, pada tahun 2009 hingga 2011 tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 14,12 menjadi 12,3 %. dan ditahun 2012 tingkat kemiskinan di Indonesia adalah sebesar 11.46% dari total penduduk di Indonesia.

Dimasing-masing Provinsi, tingkat kemiskinan yang paling tinggi berada di daerah kawasan Indonesia timur seperti Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku Utara. Pada tahun 2008 tingkat kemiskinan di Provinsi Papua mencapai 37.08% dari total penduduknya, pada tahun 2009 tingkat kemiskinan mengalami kenaikan menjadi 37.53%, dan di tahun 2010 hingga 2012 tingkat kemiskinan di Provinsi Papua mengalami penurunan yakni dari 36.80% menjadi 30,66 % dari total penduduknya. Walaupun tiga tahun terakhir mengalami penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua. Hal ini masih tergolong tinggi, karena hampir dari sepertiga total dari penduduknya tergolong masih miskin.

Salah satu faktor tingginya angka kemiskinan di Provinsi Papua adalah faktor konektivitas, karena di Provinsi tersebut masih tergolong susah dijangkau. karena faktor konektivitas ini meliputi laju inflasi yang tinggi, dimana dari biaya distribusi barang yang mahal dan rendahnya ketersediaan sarana publik yang disediakan oleh pemerintah, sehingga menyebabkan mahalnya kebutuhan barang primer di Papua, banyak

masayarakat Papua yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan primernya, dan kemungkinan jarang sekali dapat memenuhi kebutuhan tambahan lain seperti ketersediaan listrik, jalan, buku, serta akses pengetahuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kesehatan dan pendidikan merupakan dua pilar untuk membentuk modal manusia (Human Capital) dalam pembangunan ekonomi yang juga merupakan investasi dalam jangka panjang. Tercapainya tujuan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas penduduk, dimana pertumbuhan produktivitas penduduk tersebut merupakan motor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk itu sendiri. Melalui investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang diperlihatkan oleh meningkatnya pengetahuan dan keterampilan yang akan mendorong peningkatan produktivitas kerja seseorang, pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas tinggi akan memperoleh kesejahteraan lebih baik dan terhindar dari kemiskinan.

Perbaikan tingkat kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Tingkat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai indikatornya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan. Untuk menciptakan masyarakat yang sehat, tentu dibutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak, agar tujuan dari

kesehatan masyarakat Indonesia bisa tercapai. Tabel 1.2 menunjukkan perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di Indonesia pada tahun 2008 hingga 2012.

Tabel 1.2
Perkembangan Angka Harapan Hidup di 33 Provinsi Indonesia
Tahun 2008-2012

No	Provinsi	Angka Harapan Hidup (%)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Aceh	68,5	68,6	68,7	68,8	68,94
2	Sumatera Utara	69,2	69,35	69,5	69,65	69,81
3	Sumatera Barat	69	69,25	69,5	69,76	70,02
4	Riau	71,1	71,25	71,4	71,55	71,69
5	Kepulauan Riau	69,7	69,75	69,8	69,85	69,91
6	Jambi	68,8	68,95	69,1	69,25	69,44
7	Sumatera Selatan	69,2	69,4	69,6	69,8	70,05
8	Kep. Bangk Belitung	68,6	68,75	68,9	69,05	69,21
9	Bengkulu	69,4	69,65	69,9	70,16	70,39
10	Lampung	69	69,25	69,5	69,75	70,05
11	DKI Jakarta	72,9	73,05	73,2	73,35	73,49
12	Jawa barat	67,8	68	68,2	68,4	68,6
13	Banten	64,6	64,75	64,9	65,05	65,23
14	Jawa Tengah	71,1	71,25	71,4	71,55	71,71
15	DI Yogyakarta	73,11	73,16	73,22	73,27	73,33
16	Jawa timur	69,1	69,35	69,6	69,86	70,09
17	Bali	70,61	70,67	70,72	70,78	70,84
18	Nusa Tenggara Barat	61,5	61,8	62,11	62,41	62,73
19	Nusa Tenggara Timur	67	67,25	67,5	67,76	68,04
20	Kalimantan Barat	66,3	66,45	66,6	66,75	66,92
21	Kalimantan Tengah	71	71,1	71,2	71,3	71,41
22	Kalimantan Selatan	63,1	63,45	63,81	64,17	64,52
23	Kalimantan Timur	70,8	71	71,2	71,4	71,58
24	Sulawesi Utara	72,01	72,12	72,22	72,33	72,44
25	Gorontalo	66,2	66,5	66,81	67,11	67,47
26	Sulawesi Tengah	66,1	66,35	66,6	66,86	67,11
27	Sulawesi Selatan	69,6	69,8	70	70,2	70,45
28	Sulawesi Barat	67,4	67,6	67,8	68	68,27
29	Sulawesi Tenggara	67,4	67,6	67,8	68	68,21
30	Maluku	67	67,2	67,4	67,6	67,84
31	Maluku Utara	65,4	65,7	66,01	66,31	66,65
32	Papua	68,1	68,35	68,6	68,85	69,12
33	Papua Barat	67,9	68,2	68,51	68,81	69,14
	Indonesia	69	69,21	69,43	69,65	69,87

Sumber: Bps-statistik indonesia

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup di Indonesia secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun 2008-2012. dapat dilihat pada tahun 2008 Angka Harapan Hidup di Indonesia yaitu sebesar 69 %, dan mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga di tahun 2012 Angka Harapan Hidup di Indonesia berada pada angka 69,87 persen.

Dimasing-masing Provinsi, Provinsi NTB memiliki persentasi Angka Harapan Hidup terendah yaitu sebesar 61,5% ditahun 2008, mengalami kenaikan pada tahun 2009 hingga 2012, dimana pada tahun 2009 persentasi Angka Harapan Hidup (AHH) yakni sebesar 61,8% menjadi 62,73%. Sedangkan persentasi AHH tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta, Dari data diatas dapat dilihat pada tahun 2008 persentasi AHH di DKI Jakarta yakni sebesar 72,9%, mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga tahun 2012, dimana pada tahun 2009 persentasi AHH di DKI Jakarta sebesar 73,05% menjadi 73,49 persen.

Sama halnya dengan kesehatan, pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena pendidikan merupakan salah satu komponen yang ada dalam penyebab lingkaran setan kemiskinan. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah melalui pendidikan dasar wajib yang diterapkan oleh pemerintah seperti program wajib belajar 9 tahun hingga 12 tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Investasi dalam bidang pendidikan menyatu dalam pendekatan modal manusia. Modal manusia atau *Human Capital* adalah istilah yang sering digunakan untuk pendidikan dan kapasitas manusia yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas yang diperoleh.

Pendidikan minimal yang harus diterima penduduk adalah pendidikan dasar formal atau pendidikan luar sekolah yang berfungsi untuk memberantas buta huruf dan memberikan bekal keterampilan minimal kepada masyarakat. Oleh karena itu usaha memberantas kebodohan dan ketidakmampuan dan keterampilan masyarakat tidak hanya ditumpukan kepada guru, tetapi juga pada pemerintah (Danim, 2003:64).

Pada tabel 1.4 adalah data tingkat pendidikan berdasarkan persentase usia 15 tahun keatas yang melek huruf di 33 Provinsi Indonesia.

Tabel 1.4
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Melek Huruf
di 33 Provinsi Indonesia Tahun 2008-2012

No	Provinsi	Angka Melek Huruf (%)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Aceh	96,2	96,39	96,88	96,95	96,99
2	Sumatera Utara	97,08	97,15	97,32	97,46	97,51
3	Sumatera Barat	96,66	96,81	97,09	97,16	97,23
4	Riau	97,81	98,11	98,35	98,42	98,45
5	Kepulauan Riau	96	96,08	97,19	97,67	97,8
6	Jambi	96,05	96,06	96,07	96,16	96,2
7	Sumatera Selatan	97,05	97,21	97,36	97,44	97,5
8	Kep. Bangak Belitung	95,57	95,63	95,63	95,83	95,88
9	Bengkulu	94,87	94,9	95,3	95,4	95,69
10	Lampung	93,63	94,37	94,64	95,02	95,13
11	DKI Jakarta	98,76	98,94	99,13	99,15	99,21
12	Jawa barat	95,53	95,98	96,18	96,29	96,39
13	Banten	95,6	95,95	96,2	96,25	96,51
14	Jawa Tengah	89,24	89,46	89,95	90,34	90,45
15	DI Yogyakarta	89,46	90,18	90,84	91,94	92,02
16	Jawa timur	87,43	87,8	88,34	88,52	89,28
17	Bali	86,94	87,22	88,4	89,17	90,17
18	Nusa Tenggara Barat	80,13	80,18	81,05	83,24	83,68
19	Nusa Tenggara Timur	87,66	87,96	88,59	88,74	89,23
20	Kalimantan Barat	89,4	89,7	90,26	90,51	91,13
21	Kalimantan Tengah	97,67	97,69	97,79	97,84	97,88
22	Kalimantan Selatan	95,3	95,41	95,94	96,14	96,43
23	Kalimantan Timur	96,36	96,89	97,05	97,21	97,55
24	Sulawesi Utara	99,31	99,41	99,45	99,46	99,53
25	Gorontalo	95,75	95,77	96	96,1	96,16
26	Sulawesi Tengah	95,68	95,78	96,08	96,12	96,16
27	Sulawesi Selatan	86,53	87,02	87,75	88,07	88,73
28	Sulawesi Barat	87,31	87,59	88,48	88,54	88,79
29	Sulawesi Tenggara	91,42	91,51	91,85	91,95	92,04
30	Maluku	98,12	98,13	98,14	98,15	98,17
31	Maluku Utara	95,44	95,74	96,08	96,19	96,43
32	Papua	75,41	75,58	75,6	75,81	75,83
33	Papua Barat	92,15	92,34	93,19	93,39	93,74
	Indonesia	92,19	92,58	92,91	92,99	93,25

Sumber : BPS-statistik indonesia

Dari tabel 1.4 dibawah ini memperlihatkan persentase secara keseluruhan Angka Melek Huruf (AMH) di Indonesia dari tahun 2008 hingga 2012. Dimana Pada tahun 2008 hingga 2012 tingkat Angka Melek Huruf di Indonesia selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dapat dilihat secara keseluruhan pada tahun 2008, tingkat Angka Melek Huruf (AMH) di Indonesia yakni sebesar 92.19%, mengalami kenaikan menjadi 92,58 pada tahun 2009. Di tahun 2010 hingga 2012 tingkat persentasi Angka Melek Huruf di Indonesia mengalami kenaikan yaitu dari 92,91 % di tahun 2010 menjadi 93,25 % di tahun 2012.

Untuk di masing-masing Provinsi persentase AMH tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta dan Sulawesi Utara, dan yang terendah berada Provinsi Papua. dimana pada tahun 2008 AMH di Provinsi Papua yakni sebesar 75.41% dan mengalami kenaikan di tahun 2009 sebesar 75.58%, dan pada tahun 2010 hingga 2012 AMH di Provinsi Papua mengalami kenaikan yakni dari angka 75,60 % di tahun 2010 menjadi 75,83 % di tahun 2012. Dengan rendahnya tingkat pendidikan di Provinsi Papua, akan berdampak terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga tingkat produktivitasnya serta berimplikasi terhadap pendapatan yang diterima.

Selanjutnya variabel yang digunakan untuk mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah inflasi. Inflasi merupakan masalah yang terus-menerus mendapat perhatian pemerintah. Adapun yang menjadi tujuan jangka

panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku pada tingkat yang sangat rendah.

Inflasi juga dapat dikatakan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. masalah inflasi menimbulkan efek buruk terhadap kesejahteraan masyarakat dan dalam kegiatan perekonomian. Untuk itu kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi masalah inflasi.

Fenomena inflasi di Indonesia sebenarnya semata-mata bukan merupakan suatu fenomena jangka pendek saja dan yang terjadi secara situasional, tetapi seperti halnya yang umum terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang lainnya, masalah inflasi di Indonesia lebih pada masalah inflasi jangka panjang karena masih terdapatnya hambatan dalam struktural dalam perekonomian.

Inflasi dalam perekonomian disatu sisi dapat melemahkan daya beli dan dapat melumpuhkan kemampuan produksi yang mengarah pada krisis produksi dan konsumsi. Akan tetapi, disisi lain ketiadaan inflasi menandakan tidak adanya pergerakan positif dalam perekonomian karena relatif harga-harga tidak berubah. Pada tabel 1.3 dapat dilihat perkembangan laju inflasi di 33 provinsi Indonesia pada tahun 2008 hingga 2012.

Tabel 1.3
Persentase Laju Inflasi
di 33 Provinsi Indonesia Tahun 2010-2012

No	Provinsi	Laju Inflasi di Indonesia (%)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Aceh	12,03	3,73	5,92	3,44	0,23
2	Sumatera Utara	11,37	2,21	9,14	4,04	3,84
3	Sumatera Barat	12,68	2,05	7,84	5,37	4,16
4	Riau	11,66	1,37	8,03	4,09	3,28
5	Kepulauan Riau	10,15	1,66	6,79	3,54	2,97
6	Jambi	11,57	2,49	10,52	2,76	4,22
7	Sumatera Selatan	11,15	1,85	6,02	3,78	2,72
8	Kepulauan Bangka Belitung	18,4	2,17	9,36	5	6,57
9	Bengkulu	13,44	2,88	9,08	3,96	4,61
10	Lampung	14,82	4,18	9,95	4,24	4,3
11	DKI Jakarta	11,11	2,34	6,21	3,97	4,52
12	Jawa Barat	11,98	2,75	6,38	3,37	3,83
13	Banten	12,54	3,39	6,13	2,97	4,25
14	Jawa Tengah	9,47	3,62	6,63	2,7	3,89
15	DI Yogyakarta	9,88	2,93	7,38	3,88	4,31
16	Jawa Timur	10,53	3,39	6,84	3,75	4,65
17	Bali	9,25	4,37	8,1	3,75	4,71
18	Kalimantan Barat	11,92	3,03	7,81	5,82	5,41
19	Kaimantan Tengah	10,27	2,12	9,51	4,44	5,71
20	Kalimantan Selatan	11,62	3,86	9,06	3,98	5,96
21	Kalimantan Timur	14,61	4,96	7,43	6,37	5,74
22	Sulawesi Utara	9,71	2,31	6,28	0,67	6,04
23	Gorontalo	9,2	4,35	7,43	4,08	5,31
24	Sulawesi Tengah	10,4	5,73	6,4	4,47	5,87
25	Sulawesi Selatan	14,23	3,91	5,83	2,94	3,96
26	Sulawesi Barat	11,66	1,78	5,12	4,91	3,28
27	Sulawesi Tenggara	15,28	4,6	3,87	5,12	5,23
28	Nusa Tenggara Barat	13,68	3,61	8,71	6,78	3,85
29	Nusa Tenggara Timur	13,53	5,85	9,23	5,45	5,79
30	Maluku	9,34	6,48	8,78	2,85	6,73
31	Maluku Utara	11,25	3,88	5,32	4,52	3,29
32	Papua	12,55	1,92	4,48	3,4	4,52
33	Papua Barat	20,03	5,06	6,4	2,27	5
	Indonesia	11,06	2,78	6,96	3,79	4,3

Sumber: Bps-statistik indonesia

Tabel 1.3 menunjukkan perkembangan persentase laju inflasi di 33 Provinsi Indonesia dari tahun 2008-2012. Laju inflasi di Indonesia pada tabel diatas berfluktuasi. dapat dilihat pada tahun 2008 persentase laju inflasi di Indonesia secara keseluruhan sebesar 11,06 %, pada tahun 2009 laju inflasi di Indonesia mengalami penurunan yang mencapai 2,78 %. ditahun 2010 persentase laju inflasi di Indonesia mengalami kenaikan yakni sebesar 6,96 %, dan di tahun 2011 hingga 2012 laju inflasi tetap berfluktuasi karena dari data diatas menunjukkan laju inflasi pada tahun 2011 yaitu sebesar 3,79 %, mengalami kenaikan menjadi 4,30% pada tahun 2012.

Secara umum tingginya laju inflasi pada tahun 2008 yang mencapai 11,06 % disebabkan karena adanya krisis energi dunia yang ditandai dengan naiknya harga minyak dunia. kenaikan harga minyak dunia membuat pemerintah Indonesia menaikkan harga bahan bakar minyak yang mengakibatkan kenaikan harga-harga pokok secara umum.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dalam periode tahun 2008 hingga 2012 dapat dilihat fenomena terjadinya penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. oleh karena itu pentingnya kita mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana pengaruh variabel kesehatan, pendidikan, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab masalah penelitian yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Seauhmana pengaruh kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia ?
- 2) Seauhmana pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
- 3) Seauhmana pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia ?
- 4) Seauhmana pengaruh kesehatan, pendidikan, dan inflasi secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
2. Pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
3. Pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
4. Pengaruh kesehatan, pendidikan, dan inflasi secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu ilmu ekonomi pembangunan terutama teori kemiskinan, modal manusia, dan ilmu ekonomi makro terutama teori inflasi.
3. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya.
4. Bagi pemerintah adalah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil khususnya yang berhubungan dengan penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Konsep Kemiskinan

a) Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dimiliki seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum. Hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup manusia. Kemiskinan kadang juga diartikan dengan tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara (<http://wikipedia.co.id>).

Dalam Arsyad (2004:237), Kemiskinan itu bersifat multidimensional. artinya dimana kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan itu pun memiliki dua aspek, yaitu meliputi aspek primer yang berupa miskin akan asset atau modal, organisasi sosial politik, dan pengetahuan atau tingkat pendidikan, serta keterampilan yang rendah dalam suatu keahlian yang dimiliki, Dan untuk aspek sekunder yaitu berupa miskin akan asset jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, tempat tinggal, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Kemiskinan dapat diamati dari kondisi masyarakat yang tidak mau dan belum ikut serta dalam proses perubahan. Hal ini dikarenakan mereka tidak mempunyai kemampuan dalam kepemilikan faktor produksi yang memadai sehingga masyarakat tersebut tidak mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan. Ketidakikutsertaan dalam proses pembangunan ini disebabkan karena secara alamiah masyarakat tersebut belum mampu menggunakan faktor-faktor produksi. Pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk berpartisipasi, maka berakibat pada manfaat dari pembangunan yang tidak menjangkau mereka.

Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor, yaitu : (1) tingkat pendapatan nasional rata-rata, dan (2) lebar sempitnya kesenjangan distribusi pendapatan. Jadi setinggi apapun tingkat pendapatan nasional perkapita suatu negara, selama distribusi pendapatannya tidak merata, maka tingkat kemiskinan di suatu negara akan tetap parah. Demikian pula sebaliknya, seberapa apapun distribusi pendapatan nasional rata-ratanya rendah, maka kemelaratan juga akan semakin meluas (Todaro, 2004:61).

b) Ukuran Kemiskinan

Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan antara tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang dibutuhkan, sehingga memungkinkan seseorang hidup secara layak.

Dalam Arsyad (2004:239), Ukuran kemiskinan secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi dua pengertian :

1) Kemiskinan Absolut

kemiskinan absolut yaitu mengukur kemiskinan dengan membandingkan tingkat pendapatan yang diperoleh dengan biaya kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan yang dibutuhkan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering juga disebut sebagai garis kemiskinan.

Kemiskinan absolut menekankan pada pemenuhan kebutuhan fisik manusia. Tolok ukur yang dipakai adalah kebutuhan keluarga, dengan memperhatikan kebutuhan minimal yang harus dipenuhi oleh suatu keluarga untuk dapat melangsungkan kehidupan secara layak. Termasuk didalamnya kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kesehatan serta pendidikan

2) Kemiskinan Relatif

Walaupun pendapatan sudah mencapai kebutuhan dasar minimum, tetapi jauh masih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat disekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam kategori miskin. Hal ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya.

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep

ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada.

c) Indikator Kemiskinan

Menurut Kuncoro (1997:115), Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda. Ini disebabkan karena adanya lokasi dan standar kebutuhan hidup yang berbeda. Badan Pusat Statistik (2004) menggunakan batas kemiskinan dari besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita sebulan, untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedangkan untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta barang dan jasa.

Secara garis besar ada dua cara orang memandang kemiskinan. Sebagian orang berpendapat bahwa kemiskinan adalah suatu proses dan sebagian lagi memandang kemiskinan sebagai suatu akibat atau fenomena dalam masyarakat. Sebagai suatu proses, maksudnya yaitu kemiskinan mencerminkan kegagalan suatu sistem masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya dan dana secara merata kepada masyarakatnya. Dengan demikian, kemiskinan juga dapat dipandang sebagai suatu akibat dari kegagalan pasar dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara adil kepada seluruh anggota masyarakat.

d) Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Dalam Kuncoro (1997:120), terdapat penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi:

- 1) Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
- 2) Kemiskinan muncul akibat adanya perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya juga ikut rendah, yang pada gilirannya mendapatkan pendapatan yang rendah pula. Rendahnya kualitas sumber daya ini dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah, nasib yang kurang beruntung, dan adanya diskriminasi atau keturunan.
- 3) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

e) Teori Lingkaran Kemiskinan

Teori lingkaran setan kemiskinan ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse. Teori ini menjelaskan sebab-sebab kemiskinan di negara sedang berkembang. Teori ini juga mengatakan bahwa negara sedang berkembang itu miskin dan tetap miskin, karena produktivitasnya rendah, maka penghasilan yang diterima juga rendah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi minim (Kuncoro, 1997:120).

Lingkaran setan pada dasarnya berawal dari fakta bahwa produktivitas di negara terbelakang sangat rendah akibat kekurangan

modal, pasar tidak sempurna, dan keterbelakangan ekonomi. lingkaran setan kemiskinan tersebut di satu sisi dapat dijelaskan bahwa rendahnya tingkat pendapatan menyebabkan tingkat permintaan menjadi rendah, sehingga pada gilirannya tingkat investasi pun rendah. tingkat investasi yang rendah akan kembali menyebabkan kekurangan modal dan produktivitas rendah.

2. Kesehatan

a) Definisi Kesehatan

Kesehatan merupakan fenomena ekonomi yang dapat dinilai sebagai investasi, sehingga fenomena kesehatan menjadi variabel yang nantinya dapat dianggap sebagai suatu faktor produksi untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, atau sebagai suatu sasaran dari berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh individu, rumah tangga maupun masyarakat, yang dikenal sebagai tujuan kesejahteraan. Oleh sebab itu, kesehatan dianggap sebagai modal yang memiliki tingkat pengembalian yang positif baik untuk individu perorangan maupun untuk masyarakat luas.

Kesehatan juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Orang yang sehat akan mampu melakukan segala kegiatan sehingga akan memperoleh hasil yang optimal. Status kesehatan penduduk memberikan gambaran mengenai kesehatan penduduk yang biasanya dilihat melalui indikator Angka Harapan Hidup (AHH).

Dalam hal ini, Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Angka Harapan Hidup menggambarkan umur rata-rata yang dicapai seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Untuk Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah menunjukkan pembangunan kesehatan yang belum berhasil, dan semakin tinggi AHH semakin menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah tersebut.

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. AHH diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu. AHH dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan Hidup (AHH), yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH).

Didalam Todaro (2004:69), untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai standar United Nations Development Program (UNDP), dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun.

b) Pengaruh kesehatan terhadap tingkat kemiskinan

Menurut Todaro (2004:404), kesehatan adalah prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sementara keberhasilan pendidikan juga

bertumpu pada kesehatan yang baik juga. Oleh karena itu kesehatan dan pendidikan juga dapat dilihat sebagai input dalam peningkatan produktivitas.

Secara teoritis rendahnya tingkat kesehatan mengakibatkan rendahnya produktivitas, karena banyak hilang hari kerja karena sakit. Produktivitas yang rendah mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima seseorang yang akan berdampak terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin.

Dalam Arsyad (2004:243), intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Ada tiga faktor utama yang mendasari kebijakan ini. Pertama, berkurangnya beban penderitaan secara langsung memuaskan kebutuhan konsumsi pokok yang juga merupakan tujuan kebijakan sosial yang sangat penting. Kedua, perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin, dan yang ketiga yaitu kesehatan yang baik akan meningkatkan daya kerja dan output energi.

3. Pendidikan

a) Definisi Pendidikan

Pendidikan adalah hal mendasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menjamin kemajuan sosial dan ekonomi. Pendidikan juga merupakan kunci untuk menciptakan, menyerap, dan menyebarluaskan pengetahuan. Namun akses terhadap pendidikan tidak

tersebar secara merata, dan golongan masyarakat miskin yang paling sedikit mendapat bagian fasilitas pendidikan (Todaro, 2004:404).

Pendidikan merupakan satu investasi yang sangat berguna untuk pembangunan ekonomi. Di satu pihak untuk memperoleh pendidikan diperlukan waktu dan uang. Akan tetapi pada masa yang akan datang pendidikan yang telah diperoleh masyarakat dan individu akan mendapatkan manfaat dari peningkatan taraf pendidikan. dimana individu yang mendapatkan pendidikan cenderung akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi pula pendapatan yang akan diperoleh (Sukirno, 2006:443).

Investasi dalam bidang pendidikan menyatu dalam pendekatan modal manusia. Modal manusia atau *human capital* adalah istilah yang sering digunakan untuk pendidikan dan kapasitas manusia yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas yang diperoleh.

Penyediaan fasilitas pendidikan dasar merupakan prioritas utama bagi negara sedang berkembang. Walaupun jumlah penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan sudah meningkat, namun tingkat buta huruf masih tinggi, apalagi dibandingkan dengan negara-negara maju. Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara sedang berkembang untuk menyerap teknologi modern untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006:434).

Pendidikan minimal yang harus diterima penduduk adalah pendidikan dasar formal atau pendidikan luar sekolah yang berfungsi untuk memberantas buta huruf dan memberikan bekal keterampilan minimal kepada masyarakat. Oleh karena itu usaha memberantas kebodohan dan ketidakmampuan dan keterampilan masyarakat tidak hanya ditumpukan kepada guru, tetapi juga pada pemerintah (Danim, 2003:64).

Pembentukan modal manusia sering dikaitkan dengan investasi pada manusia dan pengembangannya sebagai suatu sumber yang kreatif dan produktif. Karena tanpa mengembangkan pendidikan, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan efisiensi fisik rakyat maka produktivitas modal fisik akan merosot (Jhingan, 2012: 415).

b) Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan

Pendidikan formal dan non formal bisa berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung yaitu dengan melakukan perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka (Arsyad, 2004:243).

Meskipun pemerataan dan perluasan akses pendidikan tidak berhubungan langsung dengan tingkat kesejahteraan, tetapi pendidikan merupakan investasi dan kesempatan untuk berkompetisi guna mendapatkan dan memperoleh kehidupan yang lebih baik dimasa yang

akan datang dan ikut serta dalam proses pembangunan. Dengan pendidikan yang terprogram baik dan menjangkau semua golongan, maka pendidikan menjadi instrumen yang paling efektif untuk memotong rantai kemiskinan di Indonesia (Dicky Djatnika Utama, 2009).

4. Inflasi

a) Definisi Inflasi

Khalwaty (2000:6) mendefinisikan inflasi sebagai suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga secara tajam yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka yang cukup lama. Seirama dengan kenaikan harga-harga tersebut, nilai uang turun secara tajam pula sebanding dengan kenaikan harga-harga tersebut.

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Laju inflasi adalah persentase kenaikan harga-harga pada suatu tahun yang bersangkutan berbanding dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006:27).

Badan Pusat Statistik mendefinisikan inflasi sebagai salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu wilayah atau daerah yang menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum, yang dihitung dari indeks harga konsumen. Dengan demikian inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap, dan di sisi lain juga mempengaruhi besarnya produksi barang.

Menurut Case dan Fair (2004:6) inflasi adalah kenaikan harga secara keseluruhan, sedangkan menurut Nopirin (2002 : 27) menyatakan

bahwa definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Kenaikan harga-harga karena musiman, menjelang hari-hari besar, atau yang terjadi sekali saja (dan tidak mempunyai hubungan lanjutan) tidak disebut inflasi. Kenaikan harga semacam ini tidak dianggap sebagai masalah atau "penyakit" ekonomi dan tidak memerlukan kebijaksanaan khusus untuk menanggulangnya. Jenis-jenis Inflasi menurut sifatnya :

a. Inflasi Merayap (*Creeping Inflation*)

Biasanya creeping inflation ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun). Kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan persentase yang kecil serta dalam jangka yang relative lama.

b. Inflasi Menengah (*Galloping Inflation*)

Biasanya ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya double digit atau bahkan triple digit) dan kadang kala berjalan dalam waktu yang relative pendek serta mempunyai sifat akselerasi, artinya harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan seterusnya.

c. Inflasi Tinggi (*Hyper Inflation*)

Merupakan inflasi yang makin parah akibatnya. Harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi ingin menyimpan uang. Nilai

uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang semakin cepat, harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja (misalnya adanya perang).

b) Efek Buruk Inflasi

Laju inflasi dapat menimbulkan beberapa akibat buruk kepada individu, masyarakat dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Salah satu akibat penting dari laju inflasi adalah menurunkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran sebagian kelompok masyarakat. Karena biasanya laju inflasi tersebut berlaku lebih cepat dari pada kenaikan pendapatan yang diterima dari masyarakat. Oleh sebab itu pendapatan diperoleh masyarakat yang pada awalnya dapat memenuhi kebutuhan primer, dengan adanya laju inflasi yang tinggi maka golongan masyarakat tersebut tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan primernya, dan itu akan berimplikasi kepada tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang cenderung menurun (Sukirno, 2006:15).

Penurunan nilai pendapatan akan memicu munculnya kemiskinan, jika semakin banyak kelompok masyarakat yang pendapatannya terlampaui oleh kebutuhan hidupnya, maka kelompok masyarakat itu masuk pada kategori miskin. Dengan demikian inflasi memiliki hubungan dengan kemiskinan.

c) Faktor Penyebab Inflasi

Secara kuantitas, Inflasi disebabkan oleh jumlah uang beredar dan pandangan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa yang akan datang. Sedangkan proses inflasi menurut Keynes secara ekonomis yaitu, inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuannya. Terjadinya perubahan rezeki diantara kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Masing-masing kelompok tersebut menginginkan bagian yang lebih besar dari pada kelompok yang lain. Proses perebutan ini menyebabkan permintaan masyarakat terhadap barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia.

d) Cara Mengatasi Masalah Inflasi

Menurut Sukirno (2006:23), masalah inflasi menimbulkan efek buruk terhadap kesejahteraan masyarakat dan dalam kegiatan perekonomian. Untuk itu kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi masalah inflasi, seperti :

1) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tangguh

Tujuan ini merupakan tujuan makroekonomi jangka panjang. Faktor-faktor produksi dari satu periode ke periode berikutnya mengalami perubahan dalam bentuk kualitas dan secara kuantitas, seperti penambahan jumlah penduduk yang berujung dengan penambahan jumlah tenaga kerja, pendidikan dan pengalaman kerja menambah kualitas tenaga kerja. Penawaran modal menambah barang-barang modal dan meningkatkan penggunaan teknologi yang lebih modern.

Sedikitnya ada dua alasan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tangguh di suatu negara dalam jangka panjang, yaitu dengan menyediakan lapangan pekerjaan kepada tenaga kerja yang tiap tahun nya bertambah dan menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat.

2) Mengukuhkan neraca pembayaran dan kurs valuta asing

Neraca pembayaran yang kukuh akan meningkatkan kemampuan suatu negara dalam menghadapi masalah pengaliran dana keluar negeri.

e) Pengaruh Laju Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum inflasi adalah suatu gejala naiknya harga secara terus-menerus (berkelanjutan) terhadap sejumlah barang. Kenaikan yang sifatnya sementara dan kenaikan harga terhadap satu jenis komoditi saja tidak dapat dikatakan inflasi.

Menurut Sukirno (2006:338), Kenaikan harga yang tinggi dan secara terus-menerus bukan saja menimbulkan efek buruk terhadap kegiatan perekonomian negara, tetapi juga berdampak terhadap kemakmuran masyarakat yang bisa menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun. Disaat inflasi terjadi, golongan masyarakat yang paling dirugikan adalah golongan masyarakat miskin, bahkan inflasi juga dapat menyebabkan golongan yang belum miskin akan terjatuh kedalam jurang kemiskinan. Maka mengendalikan inflasi tampaknya sebuah keharusan dan setidaknya untuk mencegah orang susah menjadi lebih susah.

B. Temuan Penelitian Sejenis

Sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, maka dilihat penelitian sebelumnya.

1. Okta Ryan Pranata Yudha (2013), dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran, dan inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia”. Dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, hal ini berarti bahwa laju inflasi berpengaruh terhadap harga-harga secara umum.
2. Dicky Djatnika Utama (2009), dalam penelitiannya yang berjudul ”Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan di Kemiskinan”, menyimpulkan bahwa Meskipun pemerataan dan perluasan akses pendidikan tidak berhubungan langsung dengan tingkat kesejahteraan, tetapi pendidikan merupakan investasi dan kesempatan untuk berkompetisi guna mendapatkan dan memperoleh kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang dan ikut serta dalam proses pembangunan. Dengan pendidikan yang terprogram baik dan menjangkau semua golongan, maka pendidikan menjadi instrumen yang paling efektif untuk memotong rantai kemiskinan di indonesia.
3. Hermanto siregar dan dwi wahyuniarti (2008), dalam jurnalnya yang berjudul “Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin”, menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.

Namun variabel yang paling signifikan dan mempunyai pengaruh yang relatif besar dalam penurunan jumlah penduduk miskin adalah pendidikan. Kebijakan yang harus dilakukan untuk penurunan jumlah penduduk miskin adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata, disamping itu diiringi juga dengan mempercepat industrialisasi pertanian, akumulasi modal manusia, pengendalian inflasi terhadap daya beli masyarakat dan pengendalian jumlah penduduk terutama untuk masyarakat miskin.

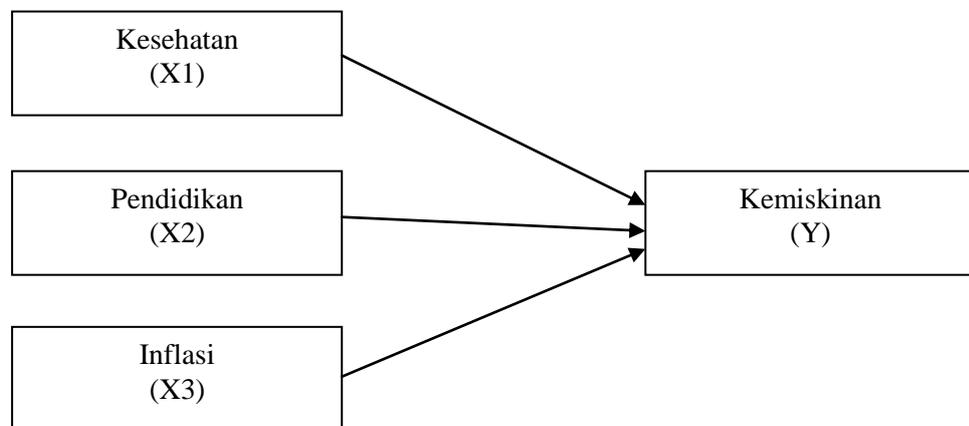
C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai kerangka berfikir untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menampilkan persepsi keterkaitan antara variabel yang diteliti berdasarkan rumusan masalah dan berpijak pada kajian teori di atas. Keterkaitan variabel yang diteliti adanya pengaruh antara kesehatan (X_1), pendidikan (X_2), dan inflasi (X_3) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia (Y).

Intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Selain itu, Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan yang akan meningkatkan produktifitas. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka pengetahuan dan keahliannya akan meningkat, sehingga akan mendorong produktivitas kerjanya. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi, maka akan

memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.

Selanjutnya inflasi dalam perekonomian disatu sisi dapat melemahkan daya beli dan dapat melumpuhkan kemampuan produksi yang mengarah pada krisis produksi dan konsumsi, karena setiap golongan masyarakat memiliki daya beli yang tidak sama. Akan tetapi, disisi lain ketiadaan inflasi menandakan tidak adanya pergerakan positif dalam perekonomian suatu negara sehingga harga-harga tidak berubah dan ini dapat melemahkan sektor industri. Untuk lebih jelas kaitan variabel-variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam skema konseptual berikut ini.



Gambar 1 : Kerangka konseptual pengaruh kesehatan, pendidikan, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian kajian teori dan kerangka konseptual diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Kesehatan mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Pendidikan mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

3. Inflasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

4. Secara bersama-sama kesehatan, pendidikan, dan inflasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_a : \text{Salah satu koefisien regresi} \neq 0$$

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil olahan data dengan analisis regresi panel dan pembahasan terhadap hasil penelitian antara kesehatan, pendidikan, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia baik secara parsial maupun secara bersama-sama, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini berarti angka harapan hidup belum efektif dalam mengentaskan tingkat kemiskinan. Ini dikarenakan dalam periode tersebut tingkat kesehatan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan.
2. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. hal ini berarti semakin tinggi pendidikan maka akan menurunkan tingkat kemiskinan.
3. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini berarti semakin tinggi laju Inflasi maka tingkat kemiskinan di Indonesia juga akan meningkat selama periode tersebut.
4. kesehatan, pendidikan, dan inflasi secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. hal ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian, terdapat bahwa pemerintah pusat diharapkan mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dimasing-masing daerah seperti pendidikan dan keterampilan. Pendidikan dan keterampilan memiliki besaran pengaruh yang relatif besar dalam mengurangi tingkat kemiskinan, untuk itu kebijakan pemerintah yang menetapkan wajib belajar 9 tahun agar ditingkatkan menjadi 12 tahun hingga perguruan tinggi. hal ini mencerminkan bahwa modal manusia merupakan determinan penting dalam mengentaskan tingkat kemiskinan.
2. inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Karena inflasi berpengaruh terhadap harga-harga secara umum. Kenaikan harga yang tinggi dan secara terus-menerus bukan saja menimbulkan efek buruk terhadap kegiatan perekonomian negara, tetapi juga berdampak terhadap kemakmuran masyarakat yang bisa menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah untuk bisa menekan laju inflasi hingga tingkat terendah agar kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.

